

BAB 3

Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini akan menguraikan terkait gambaran pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk satu periode mendatang. Pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya menggambarkan mengenai kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan periode sebelumnya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah. Gambaran tersebut selanjutnya berguna untuk menentukan kerangka pendanaan yang meliputi pengindentifikasian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja serta pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan. Kerangka pendanaan juga mencakup potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi. Analisis di dalam bab tiga ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan salah satu dasar pengalokasian anggaran dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan daerah digambarkan melalui analisis kinerja pelaksanaan realisasi anggaran daerah dan neraca daerah berdasarkan data APBD selama 5 (lima) tahun. Metode analisis yang digunakan dengan membuat perbandingan mencakup teknik analisis rasio, analisis horisontal dan analisis vertikal. Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan satu/kumpulan akun dengan satu/kumpulan akun lain di laporan keuangan untuk menggambarkan keadaan kinerja keuangan suatu daerah. Analisis horizontal dengan membandingkan satu/kumpulan akun pada periode tertentu dengan satu/kumpulan akun yang sama pada periode-periode lain. Analisis vertikal dengan membandingkan berbagai jenis akun yang terdapat di laporan keuangan pada 1(satu) periode yang sama.

Salah satu indikator untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). Indikator DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD. Kemandirian pembiayaan menggambarkan kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa depan.

**Tabel 3.1. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017**

Tahun	PAD (Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2013	5.885.262.003.582,88	11.631.697.051.829,90	50,60%
2014	6.664.586.023.490,97	11.287.300.941.021,00	59,04%
2015	4.950.160.613.906,01	9.464.926.705.876,01	52,30%
2016	4.031.514.706.408,00	7.987.877.780.773,00	50,46%
2017	4.588.752.896.230,47	8.154.749.005.918,47	56,25%
Rata-rata	5.224.055.248.723,67	9.705.310.297.083,67	53,73%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Besaran nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017 adalah 53,73 persen. Kondisi ini berarti kemandirian pemerintah tinggi dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui PAD. Kondisi tersebut berarti keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak bergantung kepada dana yang diberikan oleh pusat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Pelaksanaan APBD terdiri dari analisis terhadap pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah analisis terhadap ketiga komponen pelaksanaan APBD tersebut:

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, maupun bersumber dari dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

**Tabel 3.2. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Tahun	Rencana Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Rupiah)	% Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Pendapatan
2013	11.940.096.024.641	11.631.697.051.830	97,42%
2014	11.192.326.880.287	11.287.300.941.021	100,85%
2015	10.497.631.453.406	9.464.926.705.876	90,16%
2016	7.762.674.455.113	7.987.877.780.773	102,90%
2017	8.223.730.774.720	8.154.749.005.918	99,16%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Selama periode 2013-2017, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap rencana pendapatan. Meskipun demikian, realisasi pendapatan selama periode tersebut mengalami tren fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan nasional terkait dana perimbangan. Lebih rinci, berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013-2017 yang diklasifikasikan menurut sumbernya.

**Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata- rata Proporsi (%)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.885.262.003.583	6.664.586.023.491	4.950.160.613.906	4.031.514.706.408	4.588.752.896.230	-4,30%	53,74%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.929.791.598.767	5.429.125.998.687	3.753.718.935.816	3.127.250.928.433	3.505.578.072.171	-6,33%	42,46%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.676.707.133	15.494.252.850	14.722.788.428	19.435.790.560	16.659.010.037	-10,31%	0,21%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	291.684.072.010	310.199.925.478	230.116.057.795	167.385.377.651	208.807.497.552	-5,50%	2,47%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	630.109.625.674	909.765.846.475	951.602.831.867	717.442.609.764	857.708.316.470	10,98%	8,61%
1.2	DANA PERIMBANGAN	5.335.759.149.747	4.253.320.982.625	4.024.025.055.410	3.941.626.961.365	3.533.009.585.813	-9,52%	43,75%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	5.272.171.973.247	4.194.970.542.625	3.805.373.705.410	2.844.821.387.413	1.710.695.086.821	-23,71%	35,86%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	55.539.336.500	57.312.515.000	0	80.402.179.000	714.906.576.000	230,79%	2,15%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8.047.840.000	1.037.925.000	218.651.350.000	1.016.403.394.952	1.107.407.922.992	5313,23%	5,74%
1.2.4	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	410.675.898.500	369.393.934.905	490.741.036.560	14.736.113.000	32.986.523.875	12,41%	2,52%
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.045.173.000	16.781.978.000	11.404.893.000	9.736.113.000	10.437.936.000	-8,72%	0,13%
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	394.630.725.500	352.611.956.905	479.336.143.560	5.000.000.000	7.500.000.000	-5,92%	2,35%

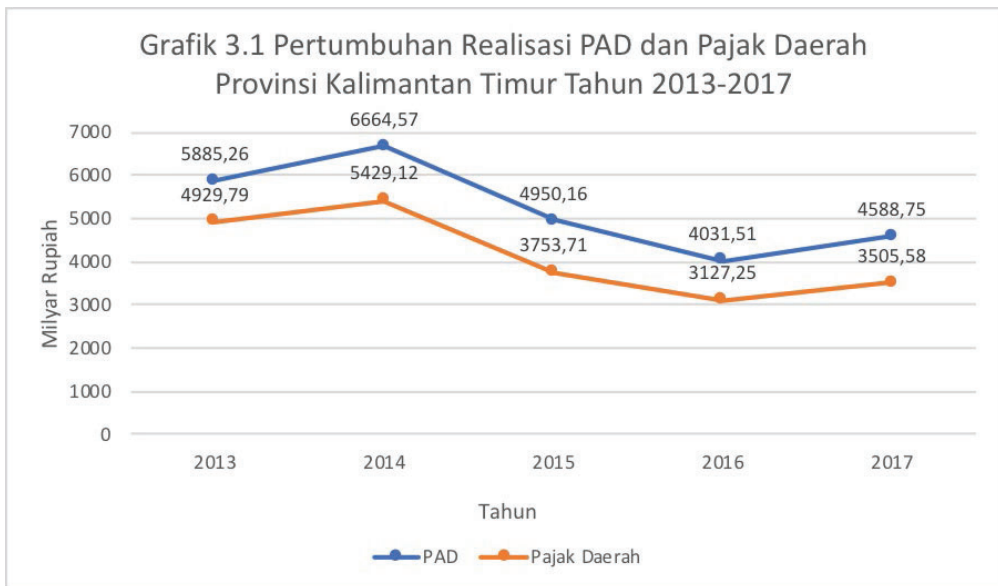
No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata- rata Proporsi (%)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0	0	15.048.587.875	0	0,04%
1.3.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PENDAPATAN		11.631.697.051.830	11.287.300.941.021	9.464.926.705.876	7.987.877.780.773	8.154.749.005.918	-8,16%	

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Provinsi Kalimantan Timur termasuk ke dalam daerah dengan kemandirian tinggi di Indonesia. Kondisi tersebut ditunjukkan ketika PAD menjadi komponen utama menyusun pendapatan daerah. Kemandirian daerah tersebut terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 42,46 persen. Meskipun demikian, besaran pendapatan pajak daerah tiap tahunnya mengalami fluktuasi pertumbuhan cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -6,33 persen. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan PAD menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun selama periode tahun 2013-2017. Rata-rata pertumbuhan sebesar -4,30 persen per tahun. Penurunan sebesar -25,71 persen terjadi pada tahun 2015. Kondisi PAD juga mengalami penurunan pada tahun 2016 yang turun sebesar -18,60 persen dari tahun 2015. Pertumbuhan PAD per tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

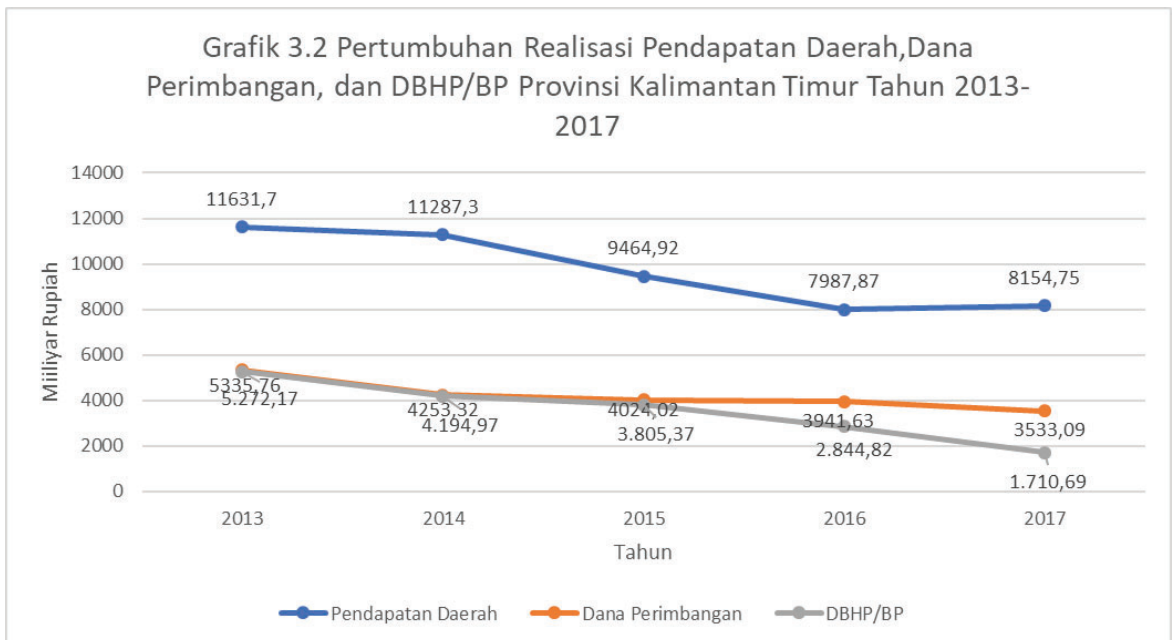


Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Komponen paling besar penyumbang PAD berasal dari pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah menuupakan juga penyumbang terbesar terhadap total pendapatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Besaran komponen ini terbesar dari pendapatan pajak berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Meskipun demikian, pertumbuhan pajak daerah cenderung turun selama periode tahun 2013-2017. Penurunan terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal tersebut dipengaruhi oleh terjadinya penurunan dari pajak kendaraan bermotor. Penyebab turunya penerimaan pajak kendaraan bermotor karena adanya penurunan daya beli dari masyarakat.

3.1.1.1.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan komponen pendapatan terbesar kedua dengan rata-rata proporsi sebesar 43,75 persen. Selama periode tahun 2013-2017, dana perimbangan rata-rata pertumbuh sebesar -9,52 persen per tahun dengan tren fluktuatif cenderung turun. Pertumbuhan dana perimbangan per tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

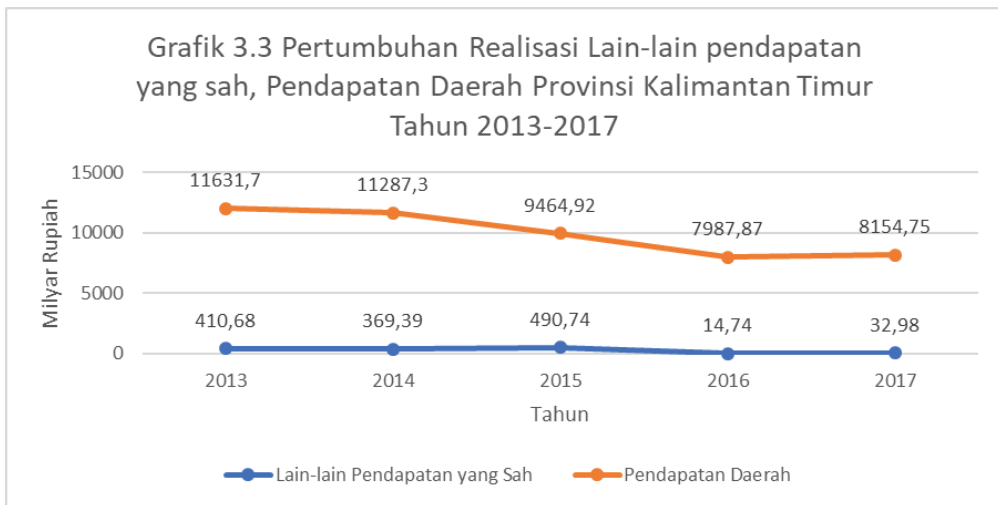


Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (DBHP/BP) merupakan penyumbang paling terbesar untuk dana perimbangan. Besaran DBHP/BP Provinsi Kalimantan Timur berasal dari dana bagi hasil dengan pemerintah pusat terkait pendapatan dari sektor sumber daya alam. Rata-rata proporsi DBHP/BP selama periode tahun 2013-2017 sebesar 35,86 persen. Meskipun demikian, tren pertumbuhan DBHP/BP menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun sama seperti tren pertumbuhan pendapatan daerah. Rata-rata pertumbuhan adalah -23,71 persen. Penurunan pendapatan dari komponen ini disebabkan oleh volatilitas anggaran. Faktor yang menyebabkan terjadinya volatilitas anggaran di Provinsi Kalimantan Timur adalah menurunnya harga jual minyak dan batubara dan tingkat produktifitas sektor minyak dan batubara.

3.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selama periode tahun 2013-2017, Lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata tumbuh 2,52 persen per tahun. Tren yang dimiliki komponen ini menunjukkan fluktuasi cenderung menurun sama dengan tren pertumbuhan Pendapatan Daerahnya. Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen lain yaitu, Lain-lain Pendapatan yang Sah. Komponen ini paling besar berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Meskipun demikian, rata-rata proporsi terhadap total pendapatan m daerah kecil hanya sebesar 2,53 persen.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan masa lalu salah satunya dengan melihat komponen Belanja Daerah. Definisi dari Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang ditentukan. Tujuan dari analisis Belanja Daerah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2013-2017 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.4. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	% Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja
2013	15.139.000.000.000	13.780.244.907.476	91,02%
2014	12.217.683.000.000	11.274.631.837.034	92,28%
2015	11.484.260.000.000	10.205.342.292.212	88,86%
2016	7.976.359.000.000	7.601.242.338.859	95,30%
2017	7.674.720.042.209	8.239.379.709.093	107,36%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun. Analisis pertumbuhan merupakan salah satu analisis lain dalam melihat kinerja belanja daerah selain menggunakan analisis efektifitas. Selama periode tersebut menunjukkan pada tingkat efektif meskipun besaran kurang dari 100 persen. Telaah pertumbuhan belanja lebih detail diperlukan untuk melihat proporsi belanja selama tahun 2013-2017.

**Tabel 3.5. Proporsi Realisasi Daerah Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Tahun (Rupiah)					
		2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	93,59 %	97,22%	88,71%	96,35%	93,10%	93,79%
2.1.1	Belanja Pegawai	83,53 %	90,52%	91,36%	88,19%	85,54%	87,83%
2.1.2	Belanja Subsidi						
2.1.3	Belanja Hibah	96,90 %	96,03%	98,90%	99,48%	91,51%	96,56%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	71,64 %	77,26%	80,35%	89,40%	83,58%	80,45%
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	97,60 %	99,47%	84,90%	97,82%	98,50%	95,66%
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	91,36 %	98,75%	88,42%	101,53 %	98,34%	95,68%
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	0,00%	15,00%	19,08%	9,62%	0,27%	8,79%
2.2	BELANJA LANGSUNG	88,44 %	86,49%	89,07%	94,14%	145,10 %	100,65%
2.2.1	Belanja Pegawai	93,19 %	100,88%	102,10 %	133,21 %	90,72%	104,02%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89,44 %	89,07%	89,83%	96,91%	94,62%	91,97%
2.2.3	Belanja Modal	87,10 %	81,58%	85,50%	84,59%	92,06%	86,17%
	BELANJA	91,02 %	92,28%	88,86%	95,30%	107,36 %	94,96%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Analisis selanjutnya dalam melihat kinerja Belanja Daerah adalah analisis proporsi realisasi terhadap perencanaan. Rincian realisasi Belanja Daerah tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi belanja tidak langsung sebesar 93,79 persen sedangkan rata-rata realisasi belanja langsung sebesar 100,65 persen. Realisasi belanja tidak langsung selama periode tersebut mengalami tren yang fluktuatif sedangkan belanja langsung

mengalami tren yang meningkat. Meskipun demikian, rata-rata realisasi belanja langsung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja tak langsung.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2013-2017 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Uraian Pembiayaan	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (Persen)
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penerimaan Pembiayaan	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA)					
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
	Pembiayaan Netto (1-2)	3.198.903.975.359,34	1.025.356.119.713,24	986.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
						5,21%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2013 hingga 2017 bersumber dari penggunaan SilPA tahun sebelumnya. *Kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Pembiayaan daerah hanya bergantung pada SilPA yang mempunyai rata-rata pertumbuhan dengan tren fluktuatif sebesar 5,75 persen. Besaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan di atas, bisa menjadi potensi penting bagi pembiayaan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya, terutama jika terjadi defisit realisasi APBD. Namun dalam melihat kebijakan dan kinerja keuangan daerah, besaran SilPA tersebut patut ditelaah lebih mendalam untuk mengetahui komponen penyusunnya.

3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan pemerintah daerah adalah neraca daerah. Neraca daerah terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalamnya, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari adanya aset. Utang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang diambil oleh pemerintah daerah karena kondisi keuangan daerah yang memungkinkan tidak stabil. Utang dalam analisis neraca dilihat dari utang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Selisih antara nilai aset dan utang didalam neraca daerah disebut sebagai ekuitas dana. Kondisi neraca daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6. Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Pertumb (%)
1	Aset						
1.1.	Aset lancar	3,189,372,457,985.78	3,515,289,699,289.26	2,794,480,674,938.52	3,339,405,804,164.78	3,411,721,430,648.76	2.84
1.2.	Investasi jangka panjang	2,307,568,136,886	2,179,088,079,707	2,118,541,287,430	2,277,501,235,381	2,460,721,222,689.26	1.8
1.3.	Aset tetap	21,996,096,815,949.40	24,220,982,878,331.00	18,382,849,193,614.30	17,175,963,871,129.80	21,357,892,468,817.10	87.64
1.4.	Aset lainnya	151,881,580,658.91	174,339,515,972.00	132,704,136,253.30	320,313,481,494.34	1,035,220,371,759.79	88.86
	Jumlah aset daerah	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.40	23,113,184,392,170.20	28,265,555,493,914.90	1.91
2	Kewajiban						
	Kewajiban jangka pendek	632,278,528,956.51	913,791,245,661.67	468,763,491,805.24	716,158,960,129.10	1,074,749,726,990.98	24.66
3	Ekuitas dana	27,012,640,462,523.70	29,175,908,927,637.40	22,959,811,800,431.10	22,397,025,432,041.10	27,190,804,766,923.90	1.41
	Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.30	23,113,184,392,170.20	28,265,554,493,914.90	1.91

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun adalah pada komponen aset lainnya, yakni sebesar 88,86 persen. Aset lainnya antara terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Komponen aset yang paling pertumbuhan tertinggi kedua adalah aset tetap, sebesar 87,64 persen. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; serta konstruksi dalam pengerjaan. Adanya pertumbuhan yang tinggi dalam aset tetap ini dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, karena aset tetap daerah terkait kebutuhan pembangunan, terutama di bidang sarana dan prasarana wilayah. Pertumbuhan komponen aset daerah yang tidak signifikan adalah aset lancar sebesar 2,84 persen dan investasi jangka panjang sebesar 1,8 persen. Rata-rata pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan adalah 1,91persen. Pertumbuhan aset tersebut jauh lebih rendah jika dibanding pertumbuhan utang atau kewajiban. Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki kewajiban jangka pendek, namun rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah 24,66 persen. Ada rata-rata pertumbuhan ekuitas dana sebagai selisih antara aset dan kewajiban, yakni sebesar 1,41persen.

Pertumbuhan berbagai komponen neraca daerah tersebut, kemudian dianalisis secara lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio. Analisis neraca daerah yang *pertama* adalah menggunakan rasio likuiditas. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Adapun jumlah persediaan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.7 Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumb. (%)
Persediaan	1,782,357,165,828. 78	1,997,096,484,129. 34	2,057,431,888,726. 55	2,204,883,737,445. 40	2,513,224,064,671. 43	9.05

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Tabel 3. 8 Rasio Likuiditas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	5.04	3.84	5.96	4.66	3.17	4.53
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	2.22	1.66	1.57	1.58	0.83	1.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui perhitungan rasio lancar dan rasio quick, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun dengan nilai yang tidak cukup besar. Rasio lancar memiliki rata-rata rasio sebesar 4,53, sedangkan rasio quick memiliki rata-rata 1,57. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kewajiban jangka pendek yang selalu ada setiap tahun dan memiliki rata-rata pertumbuhan cukup besar, yakni 24,66 persen. Adapun kondisi rasio quick yang lebih kecil dibanding dengan rasio lancar karena dipengaruhi oleh adanya pengurangan aset lancar oleh persediaan. Kondisi tidak signifikannya nilai rasio lancar maupun quick perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah, serta adanya kebijakan pengambilan kewajiban jangka pendek perlu memiliki langkah cermat.

Analisis neraca daerah yang *kedua* dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui

perhitungan rasio total hutang terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.9. Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0.022	0.0303	0.020	0.0309	0.038	0.028
2	Rasio hutang terhadap modal	0.023	0.0313	0.020	0.0319	0.039	0.029

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kondisi yang *solvable*. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan rasio likuiditas, dimana semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik atau *solvable*. Rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal memiliki kondisi yang fluktuatif selama 2013 hingga 2017, sedangkan rata-rata nilai rasio keduanya hampir sama, yakni 0,028 pada rasio total hutang terhadap total aset, dan 0,029 pada rasio hutang terhadap modal. Perhitungan kedua rasio tersebut hanya menggunakan kewajiban jangka pendek, karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama tahun 2013 hingga 2017.

Analisis neraca daerah yang *ketiga* menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dari 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Guna memperoleh nilai perputaran piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang dengan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Adapun nilai piutang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.10. Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumb. (%)
Piutang	709,122,636,012.55	883,288,619,506.39	671,448,413,308.87	755,022,737,028.12	634,847,129,148.19	-20.57%

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk pelayanan publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai perputaran persediaan, maka nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-rata nilai persediaan diperoleh melalui penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan kemudian dibagi dua.

Tabel 3.11. Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rata-rata Umur Piutang	21.29	25.75	29.97	32.59	31.09	28.14
2	Rata-rata Umur Persediaan	282.42	345.38	359.65	352.80	342.61	336.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengubah piutang menjadi kas cukup baik, yakni rata-rata selama 28.14 atau kurang dari satu bulan. Perhitungan yang berbeda terdapat pada rata-rata umur persediaan, yakni jika umur piutang lebih pendek atau sedikit maka lebih baik, sedangkan umur persediaan semakin lama, maka semakin baik. Pada konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki rata-rata umur persediaan yang baik, yakni memiliki rata-rata 336.57 atau hampir selama satu tahun. Kondisi ini menjadikan keuangan pemerintah daerah yang relatif stabil, karena dana persediaan tidak dicairkan secara cepat atau relatif tidak ada kebutuhan mendesak untuk menggunakan dana persediaan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan tren yang fluktuatif. Berikut adalah analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

**Tabel 3.12. Proporsi Belanja Pemenuh Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) (a)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b)	Prosentase (a) / (b) x 100%
1	2013	1.347.618.824.617,36	13.780.244.907.476,00	9,78%
2	2014	1.425.146.092.811,10	11.299.631.837.034,30	12,61%
3	2015	1.467.682.098.123,30	10.255.342.292.212,00	14,31%
4	2016	1.329.010.912.560,17	7.601.242.338.859,40	17,48%
5	2017	1.674.309.092.675,44	8.239.379.709.093,14	20,32%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah mengalami tren meningkat. Proporsi selama periode tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber deficit riil dan analisis SiLPA. Secara umum berikut adalah analisis terhadap pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

3.2.2.1 Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan

dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah

dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	11.631.697.051.829,90	11.287.300.941.021,00	9.464.926.705.876,01	7.987.877.780.773,00	8.154.749.005.918,47
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	13.780.244.907.476,00	11.274.631.837.034,30	10.205.342.292.212,00	7.601.242.338.859,40	8.239.379.709.093,14
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
A	Defisit riil	-2.148.547.855.646,10	-12.330.896.013,35	-790.415.586.335,99	386.635.441.913,60	-84.630.703.174,67
	Diutupi oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	1.050.356.119.713,24	1.038.025.223.699,89	246.212.960.258,02	613.319.986.802,44	526.487.421.571,88

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Secara riil, kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 ketika APBD mengalami defisit. Penutup defisit itu, terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Kondisi berbeda pada tahun 2016 yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.

3.2.2.2 Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2013-2017:

**Tabel 3.14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	1.050.356.119.713	100,00%	1.038.025.223.700	100,00%	246.212.960.258	100,00%	600.319.986.801	100,00%	-	100,00%
1	Pelampauan penerimaan PAD	341.645.425.583	32,53%	893.384.197.741	86,07%	-144.985.366.695	-58,89%	110.149.838.331	18,35%	1.123.738.108.106	6,14%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-637.827.016.894	-60,72%	-800.677.641.912	-77,13%	-894.874.751.295	-363,46%	128.499.421.929	21,41%	-491.637.254.661	43,75%
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	-12217381500	-1,16%	2.267.504.905	0,22%	7.155.370.460	2,91%	-13.445.934.600	-2,24%	1.492.106.708	-0,13%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.358.755.092.524	129,36%	943.051.162.966	90,85%	1.278.917.707.788	519,44%	375.116.661.141	62,49%	-564.659.666.884	50,25%
5	Pelampauan pembiayaan netto	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	48.475.533	0,00%

Perolehan SiLPA selama tahun 2013-2017 sebagian besar diperoleh penghematan belanja yang tidak teresap. Hal tersebut mengidentifikasi dua yaitu efektivitas dalam penghematan anggaran atau belum optimalnya dalam penganggaran belanja daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari, *pertama* strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan *kedua*, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk lima tahun mendatang. Dalam konteks secara makro, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan anggaran selaku nadi dari pembangunan daerah diharapkan dapat linier untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, serta untuk menghindari adanya persoalan terkait pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah sebagai berikut :

- Akuntabilitas, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan
- Profesionalitas, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah
- Proporsionalitas, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah
- Transparansi, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik
- Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri

3.3.1. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberapa komponen tersebut:

3.3.1.1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- Komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui optimalisasi sistem retribusi dan pajak daerah
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola retribusi/pajak daerah.
 - c. Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, OPD teknis penghasil, dan kecamatan
 - d. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis
- Bagi Provinsi Kalimantan Timur, komponen pendapatan transfer menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait DBHBP Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan pendapatan transfer.

- b. Upaya peningkatan jumlah DBHBP ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu
- Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian

3.3.1.2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang keduanya menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, yaitu melalui:

- Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan.
- Selanjutnya penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan renstra OPD maupun perencanaan teknis setiap tahun dalam bentuk RKPD dan renja OPD
- Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari :

- a. Prioritas I : merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada publik, serta untuk

melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.

- b. Prioritas II : merupakan belanja daerah berdasarkan program prioritas dalam setiap OPD
- c. Prioritas III : merupakan belanja operasi daerah yang antara lain adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS
- d. Kebijakan belanja operasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan
- e. Alokasi belanja operasi, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah

3.3.1.3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi ini didasarkan pada tren rata-rata pertumbuhan dan rata-rata proporsi komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Selain itu juga memperhatikan kemungkinan perkembangan perekonomian makro kedepan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada pendapatan daerah. Lebih rinci untuk melihat proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.15 Proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	9.269.338.134.000	9.136.092.641.000	9.612.985.144.000	9.959.301.641.000	10.262.274.361.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.393.011.979.500	5.681.155.000.000	6.056.844.503.000	6.368.640.000.000	6.622.088.720.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.360.000.000.000	4.634.500.000.000	4.891.135.000.000	5.124.312.050.000	5.328.820.209.500
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.616.725.000	33.620.185.000	22.489.341.200	21.723.275.704.	31.209.722.618
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	224.523.866.374	227.111.004.398	347.869.891.338	416.492.946.444	435.905.980.434
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	779.871.388.126	785.923.810.602	795.350.270.462	806.111.727.852	826.152.807.448
1.2	DANA PERIMBANGAN	3.854.170.762.500	3.442.517.641.000	3.543.533.641.000		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak	637.329.276.400	708.500.000.000	717.700.000.000	727.000.000.000	737.000.000.000
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	2.401.147.845.100	1.918.324.000.000	2.010.140.000.000	2.035.170.000.000	2.074.500.000.000
1.2.3	Dana Perimbangan Lainnya	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.155.392.000	12.420.000.000	12.607.000.000	12.798.000.000	12.992.000.000
2	BELANJA	7.900.542.523.430	7.756.766.021.144	7.629.231.405.042	7.517.351.516.783	7.420.578.827.885
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.652.175.257.980	4.406.075.186.833	4.172.993.809.449	3.952.242.436.929	3.743.168.812.016
2.1.1	Belanja Pegawai	1.303.461.781.283	1.234.508.653.053	1.169.203.145.307	1.107.352.298.920	1.048.773.362.307
2.1.2	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Hibah	849.899.475.885	804.939.793.610	762.358.478.528	722.029.715.014	683.834.343.090
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.756.180.842	3.557.478.875	3.369.288.243	3.191.052.895	3.022.246.197
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.858.916.562.356	1.760.579.876.207	1.667.445.200.756	1.579.237.349.636	1.495.695.693.840

Komponen pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2019-2023 sebesar 1,79 persen. Proyeksi didasarkan pada perhitungan analisis data tahun 2013-2018 dan potensi pendapatan. Perhitungan proyeksi tidak mencakup komponen pendapatan daerah yang tidak lagi menjadi wewenang provinsi seperti Dana Alokasi Khusus. Peningkatan pendapatan daerah tersebut diupayakan berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah/OPD dalam menghasilkan PAD.

Komponen belanja daerah diproyeksikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan komponen wajib dan mengikat selama tahun 2013-2018 serta asumsi indikator makro yaitu inflasi. Komponen belanja daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2019-2023 sebesar -1,55 persen. Proyeksi tersebut diharapkan kebijakan belanja didasarkan pada prioritas dan kebutuhan riil daerah.

Tren realisasi pendapatan dan belanja dalam tahun 2019-2022 menunjukkan kondisi defisit sedangkan pada tahun 2023 mulai mengalami kondisi surplus. Hal ini di satu sisi menunjukkan kondisi pendapatan yang tidak dapat membiayai belanja. Kondisi defisit memerlukan kewaspadaan karena besaran belanja yang melebihi kemampuan pendapatan daerah. Olehkarena itu, diperlukan strategi lain dalam hal penutupan defisit belanja dari sisi penerimaan pembiayaan.